



LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, maka Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Pengukuran Kinerja merupakan kegiatan pengumpulan data dan pemantauan atas kemajuan dari indikator kinerja yang telah dicapai, dibandingkan dengan perencanaan tujuan dan sasaran serta pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat.

Dalam rangka mendukung pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP, salah satunya dengan membuat laporan pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.

Penulis menyadari bahwa Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat Tahun 2025 masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan

selanjutnya sangat kami harapkan.

Akhir kata, melalui Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB akan selalu memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, dan semoga dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Kepala Dinas

Drs.H.Muhammad Yunus
Pembina Utama Muda
NIP.19680417 198810 1 001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja.....	2
1.5 Sasaran.....	3
BAB II PENGUKURAN KINERJA	4
2.1 Pengertian Pengukuran Kinerja.....	4
2.2 Prinsip Pengukuran Kinerja	4
2.3 Tingkatan Pengukuran Kinerja	4
2.4 Langkah-langkah Pengukuran Kinerja.....	5
2.5 Indikator Kinerja Utama	6
BAB III MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA.....	7
3.1 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama.....	7
3.2 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan.....	7

BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA	8
BAB V PENUTUP	10
LAMPIRAN I.....	11
LAMPIRAN II.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.....	6
Tabel Lampiran I.....	11
Tabel Lampiran II.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, yang dinilai/dievaluasi meliputi:

- a. pengukuran kinerja telah dilakukan;
- b. pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat.

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi unit kerja.

1.2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari laporan pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah aksi penyempurnaan dokumen AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. Pembangunan sistem pengukuran kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- c. Sebagai panduan/pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala; dan
- d. Peningkatan kinerja unit kerja dan penyamaan persepsi pengukuran kinerja.

1.4. Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat dari laporan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kinerja yang telah dicapai melalui upaya-upaya (kebijakan, program, kegiatan) yang telah dilakukan;
- b. Dasar peningkatan kinerja yang direncanakan untuk

tahun berikutnya;

- c. Menjadi (salah satu) dasar pengambilan keputusan;
- d. Sebagai alat komunikasi baik internal maupun eksternal;
- e. Untuk mengidentifikasi kepuasan pemanfaatan pelayanan kepada *stake holders*.

1.5. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari laporan pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran perangkat daerah disemua jenjang pelaksanaan.
- b. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatnya kooordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

BAB II

PENGUKURAN KINERJA

2.1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.

2.2. Prinsip Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat keputusan- keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja, hal penting yang harus dilakukan adalah:

- a. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja. Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja disetiap unit kerja yang mampu mengintegrasikan data kinerja dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja;
- b. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah diperjanjikan oleh pimpinan unit kerja;
- c. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

2.3. Tingkatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan pada tingkat:

a. Unit Eselon II

Ukuran keberhasilan kinerja unit eselon II dalam menjalankan program diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*, yang merupakan hasil dari berfungsinya *output* yang dihasilkan oleh unit satuan kerja. Pengukuran kinerja unit eselon II dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

b. Unit Eselon III

Ukuran keberhasilan unit eselon III dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada level *output* dan *output* penting (*hasil/outcome*). Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

c. Unit Eselon IV/Fungsional

Ukuran keberhasilan unit eselon IV/Fungsional dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada subkegiatan yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

d. Unit Pelaksana

Unit Pelaksana adalah unit terkecil yang berada dalam suatu

perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam membantu keberhasilan ketercapaian kinerja eselon IV/fungsional. Ukuran keberhasilan unit pelaksana dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada indikator-indikator subkegiatan yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

2.4. Langkah-langkah Pengukuran Kinerja

Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
- b. Membandingkan realisasi dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja yang direncanakan dalam rencana strategis;

2.5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi. Ketercapaian target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja akan menjadi indikator keberhasilan IKU. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat:

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
KB**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target Kinerja	
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan terhadap perempuan dan anak, mengendalikan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya Kesetaraan Gender	-	Indeks Pembangunan Gender	89,5
			-	Indeks Pemberdayaan Gender	70,5
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan anak	-	Ratio Kekerasan terhadap perempuan	3
		Meningkatnya kualitas keluarga	-	Angka Perceraian	0,5
		Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Nindya	Nindya
		Terkendalinya Kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	-	Angka Total Kelahiran/ TFR Per WUS	2,35
			-	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	65%

		Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)	-	Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	66,68
			-	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 14-49 tahun	69,7

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sebelum melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja, maka diperlukan pengumpulan data capaian kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB menggunakan metode *bottom up*. Data diperoleh dari unit bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU serta indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pengukuran IKU dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB membentuk Tim Pengumpulan Data IKU (lintas bidang) untuk membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk *soft-copy*, kemudian diunggah (*upload*) pada *e_sakip* dan *E Sakip Kabupaten*.
- c. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebagai koordinator dan bertanggung jawab ditingkat perangkat daerah.

3.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui

ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/subkegiatannya kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat melalui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang dilakukan secara periodik setiap bulan atau triwulan.
- b. Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi (Laporan Kinerja) dan Bappeda (Monev Triwulan e 81).

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (*input* atau masukan) yang berada di bawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan.

Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- a. Perbandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
- b. Analisis-*analisis* terhadap terjadinya:
 1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran; dan
 2. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

- a. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran

presentase pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan subkegiatan). (Lampiran I)

b. Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. (Lampiran II)

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja *outcome* dan *output* sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja juga berfungsi sebagai rangkaian/proses penyampaian laporan kinerja berkala dalam rangkaian pertanggungjawaban kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Barat. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Barat.

Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja ini disusun untuk mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan pengukuran kinerja ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pengukuran kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan diharapkan dapat membantu seluruh unit, sehingga penilaian SAKIP di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Tanjung Jabung Barat

Drs.H.Muhammad Yunus
Pembina Utama Muda
NIP .19680417 198810 1001

Lampiran I
Evaluasi Kinerja Kegiatan

Evaluasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2025	REALISASI KINERJA PADA 2025					
							TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	15	3	3	4	4	3	3
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	31	31	31	31	31
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	-	-	-	-	3	3

		Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12	4	4	4	4	4	4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	284	16	16	0	0	108	108
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	166	31	31	1	1	50	50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	4	4	2	2	6	6
	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat	2	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	77	-	-	94	94	-

		Dinas Jabatan									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	1	1	2	2	2	2
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	1	1	1	1	1
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20	-	-	20	20	-	-
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	-	-	36	36	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	-	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	1
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	1	-	-	-	-	-	-

DINAS P3AP2KB

			Kantor	Umum Kantor yang Disediakan							
Meningkatnya Implementasi Peran Utama Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kab/Kota	15	8	8	-	-	-	-
			Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggara PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	15	8	8	7	7	-	-
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	1	1	1	1	1

DINAS P3AP2KB

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5	0	0	5	5	0	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30	7	7	8	8	18	18
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengadaan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	8	0	0	0	0	4	4
	PROGRAM PENINGKATAN	Peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Komunikasi,	Jumlah Komunikasi,	4	-	-	-	-	2	2

DINAS P3AP2KB

	N KUALITAS KELUARGA	dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Hikekeluargaan dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	0	0	0	0	0	0
Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah,	45	2	2	5	5	38	38

								Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	-	-	2	2
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6000	-	-	-	-
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	0	0	-	-

		Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota							
Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30	3	3	10	10	12	12
		Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	30	30	30	-	-	-	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	19	0	0	-	-	19	19

DINAS P3AP2KB

Terkendalin ya Kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaata n bonus demografi	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasiliasi Pelaksanaan Pendidikan Kependuduk an Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Nonformal, dan informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sinkronisasi dan Fasiliasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, SLTP/MTs, Jalur Nonformal, dan informal	23	3	3	0	0	20	20				
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Sistem Informasi Keluarga	1			0	0	0	0		
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	13	2	2	3	3	4	4	
								Pencatatan dan pengumpul an data keluarga	1	-	-	-	-	-	-
							Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalia		Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data	13	0	0	3	3	5

DINAS P3AP2KB

			n Lapangan dan Pelayanan KB	Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21	0	0	-	-	10	10
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	-	-	-	-	-	-

DINAS P3AP2KB

		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Kordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	-	-	-	-	-	-
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	-	-	-	-	-
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	268	0	0	268	268	268	268

DINAS P3AP2KB

		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	1	1	4	4	5	5
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600	0	0	388	388	892	892
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12	1	1	4	4	3	3

DINAS P3AP2KB

		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50	8	8	-	-	-	-
			Pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49	0	0	-	-	25	25
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha	1	0	0	-	-	-	-

Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Akseptor
(UPPKA)

Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Akseptor
(UPPKA)

Pengadaan
Sarana
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
(BKB, BKR,
BKL, PPKS,
PIK-R, dan
Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Akseptor
(UPPKA)

Jumlah Unit
Sarana
Kelompok
Kegiatan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga (BKB,
BKR, BKL,
PPKS, PIK-R,
dan Usaha
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga
Akseptor
(UPPKA)

10 0 0

- - - -

Pengelolaan
Ketahanan
Keluarga
Melalui
Pusat
Pelayanan
Keluarga
Sejahtera
(PPKS)

Jumlah laporan
hasil
pengelolaan
Ketahanan
Keluarga
Melalui Pusat
Pelayanan
Keluarga
Sejahtera
(PPKS)

1 0 0

- - - -

		<p>Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/kelahiran, Baduta/ Balita</p>	<p>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</p>	1	-	-	-	-	-	-
		<p>Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)</p>	<p>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</p>	1	-	-	-	-	-	-

Lampiran II
Evaluasi Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,5	86,8	97
		- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,5	63,43	90
2.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap	Ratio kekerasan terhadap Perempuan	3	11	367
3.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian	0,5	0,4	80
4.	Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	NINDYA	PRATAMA	PRATAMA
5.	Terkendalinya dan Kualitas serta pemanfaatan bonus demografi	- Angka Total kelahiran / (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 tahun	2,35	2,28	103,07
		- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	65	23	282,6
6.	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas pelayanan kesehatan berencana dan reproduksi (KB/KR)	- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,68	63,66	95,47
		- Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR bagi perempuan Menikah usia 15-49 tahun	69,7	71	101,86
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/(Unmeet need)	17,05	5,3	321,69